

Evaluasi Kinerja Hutan Kemasyarakatan Merte Sari Desa Sengigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

Muhammad Ghozul Fikri¹, Markum², Budhy Setiawan³

^{1,2,3}Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v6i1.468>

Article Info

Received: 25 September 2024

Revised: 04 November 2025

Accepted: 28 February 2025

Correspondence:

Email: markum.exp@unram.ac.id

Abstract: This research evaluates the management performance of the Merte Sari Community Forest (HKm) in Sengigi Village, Batu Layar District, West Lombok Regency, with a focus on social aspects and supporting and inhibiting factors. Referring to the HKm evaluation guidelines in Perdirjen P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019, this research found that Merte Sari's HKm management performance was in the good category with a score of 286, reflecting increased community welfare, institutional strengthening, behavioral changes management, and contribution to forest management. Supporting factors include good planning, member participation, institutional training, and women's involvement. However, inhibiting factors include a lack of biophysical data and NTFP potential, as well as suboptimal coordination and enforcement of regulations. This research suggests the need for forest product processing training, regular institutional development, institutional strengthening with the help of related parties, and further research on the potential for environmental services to support the development of the Merte Sari HKm. Interviews are a method of data collection where there is a question and answer interaction between researchers and respondents in this research, the approach used is based on the research objectives.

Keywords: Community Forest Management (HKm), Supporting and Inhibiting Factors, Community Welfare.

Citation: Fikri, M. G., Markum, M., & Setiawan, B. (2025). Evaluasi Kinerja Hutan Kemasyarakatan Merte Sari Desa Sengigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 19-27. doi: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v6i1.468>

Pendahuluan

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang kegunaannya untuk pemberdayaan masyarakat. (Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9, 2021)

Evaluasi adalah penilaian terpadu yang digunakan sebagai upaya refleksi (refleksi diri), introspeksi diri (self-regulation), peningkatan kinerja, pembinaan, dan sebagai sarana belajar bersama; dan bukan alat represi (kekuatan dan pemaksaan kehendak). Monitoring dan evaluasi partisipatif (monev) merupakan upaya pemantauan partisipatif oleh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, pencapaian, dan kendala dalam pengelolaan HKm dari rencana kerja yang telah dibangun dan sebagai sarana pembelajaran bersama (Dianti, 2017).

Perizinan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diberikan dengan jangka

Email: markum.exp@unram.ac.id

waktu 35 tahun, dan evaluasi dilaksanakan setiap 5 tahun. Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan HKm. Penilaian dalam evaluasi ini meliputi aspek ekonomi, selain aspek ekonomi, evaluasi ini juga mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial. Tujuan dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk menganalisis pencapaian kegiatan fisik dan non-fisik dalam pengelolaan lahan HKm selama periode waktu tertentu. Apabila target yang telah direncanakan belum tercapai, evaluasi dapat mengungkapkan hal ini melalui evaluasi, dapat diidentifikasi penyebab mengapa target-target tersebut belum tercapai atau tidak sesuai dengan perencanaannya, (*Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9, 2021*)

Konflik pengelolaan sumber daya alam di NTB adalah hutan dari perebutan akses dan tata kelola antara pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan orang lokal. Dengan demikian, tujuan didirikannya Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Murbani (2006) juga mengatakan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan merata dari sumber daya hutan melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat (M. Fauzi & Nahlunnisa, 2021).

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kinerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Merte Sari dilihat dari aspek sosial? Kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan HKm Merte Sari? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan HKm serta dinamika yang memengaruhi keberhasilan program ini di Desa Sengigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam. Fokusnya adalah pada realitas sosial yang ada, dengan wawancara langsung sebagai metode utama pengumpulan data, yang memungkinkan peneliti memahami konteks dan makna fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Merte Sari, Desa Sengigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang telah beroperasi sejak penerbitan Izin Usaha Pengelolaan HKm pada 8 Juli 2011. Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti memilih

area yang memenuhi syarat evaluasi program perhutanan sosial dan melibatkan 21 responden dari 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai key informan. Alat penelitian yang digunakan meliputi laptop, kamera, alat tulis, dan recorder, serta data yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder dari instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak program HKm terhadap masyarakat setempat.

Sampel dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, metode purposive sampling diterapkan untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Responden yang diwawancarai harus memenuhi syarat, yaitu menjadi pengurus dalam Gapoktan Merte Sari dan merupakan anggota aktif yang rutin mengikuti pertemuan kelompok serta terlibat dalam pengelolaan lahan di kawasan tersebut (Dianti, 2017). Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari individu yang benar-benar memahami dan terlibat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), sehingga data yang dikumpulkan akan lebih relevan dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencakup hasil skoring dari evaluasi pengelolaan HKm Merte Sari, sementara data kualitatif berasal dari wawancara yang direkam dan mencakup penjelasan serta keterangan dari responden. Sumber data utama meliputi data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan total skoring evaluasi, serta data sekunder yang berupa dokumen terkait pengelolaan HKm. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara terkontrol, observasi langsung terhadap variabel penelitian, dan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang diperlukan (Dianti, 2017).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya melalui Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019. Dalam konteks ini, evaluasi kinerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Merte Sari mengikuti pedoman yang mengatur prosedur dan parameter evaluasi perhutanan sosial. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner, data yang dikumpulkan akan ditabulasi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengelolaan HKm berdasarkan indikator yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil evaluasi

dengan menerapkan sistem skoring yang telah ditentukan. Setiap aspek dalam kuesioner diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan pentingnya, sehingga hasil evaluasi dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan cara ini, analisis tidak hanya mengukur kinerja secara keseluruhan, tetapi juga memperlihatkan kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan HKM Merte Sari. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam program perhutanan sosial di kawasan tersebut.

Tabel 4 Interval nilai skor pada masing-masing kriteria

| No | Kriteria | Interval Nilai | |
|--------|---|----------------|-----------|
| | | Terendah | Tertinggi |
| 1 | Kriteria Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa | 19 | 57 |
| 2 | Kriteria Penguatan kelembagaan | 61 | 183 |
| 3 | Kriteria Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola | 14 | 42 |
| 4 | Kriteria Resolusi Konflik | 15 | 45 |
| 5 | Sensitivitas Gender | 16 | 48 |
| 6 | Kriteria Kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait | 10 | 30 |
| Jumlah | | 135 | 405 |

Kinerja HKM didasarkan atas 4 kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat Baik
- b. Tidak Baik
- c. Kurang Baik
- d. Baik

Nilai Interval = $(405-135)/4 = 67,5$ (dibulatkan 68)

Tabel Kriteria Kinerja HKM

| No | Kriteria Kinerja | Interval Nilai Skor |
|----|------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Baik | >339 – 405 |
| 2 | Baik | >271 – 339 |
| 3 | Kurang Baik | >207 – 271 |
| 4 | Tidak Baik | 135 – 203 |

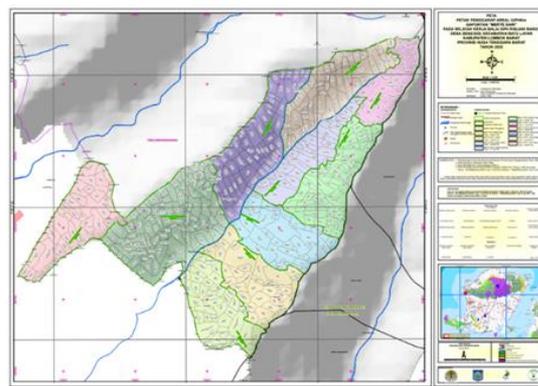
Hasil dan Pembahasan

Hutan Kemasyarakatan Merte Sari secara administrasi berlokasi di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Hutan Kemasyarakatan Merte Sari memiliki luas 226 Ha yang

berstatus hutan lindung berdasarkan SK nomor 789/45/DISHUT/2011. Areal HKM Mertesari berbatasan langsung dengan:

- Utara : Hutan Lepas
- Selatan : Desa Senggigi
- Timur : Twa Kerandangan
- Barat : Desa Batu Layar

Kondisi kawasan Hutan Kemasyarakatan Merte Sari Desa Senggigi berdasarkan hasil observasi termasuk dalam jenis hutan sekunder dengan didominasi kelerengan lahan katagori curam dan berbukit (tipe D) sekitar 100% dari luas total areal. Berikut merupakan gambaran areal kerja Hkm Merte Sari.



Gambar.1 Peta Areal Kerja HKM Kelompok Tani Hutan Merte Sari (KPH, 2020)

Dalam pengelolaan HKM Merte Sari ini terdapat kelompok tani hutan yang mengelola berdasarkan izin yang telah ada melalui SK.358/Menhut-II/2011 sebagai pemegang IUPHKM. Kelompok tani hutan Merte Sari merupakan wadah masyarakat dalam mengelola hutan secara resmi yang terdiri dari 10 sub kelompok dengan total anggota keseluruhan sebanyak 509 orang.

Karakteristik Responden Umur Responden

Umur petani berkaitan dengan kemampuan kerja fisik dan kematangan psikologisnya, petani yang berumur muda mempunyai daya kerja fisik yang kuat namun jika tidak dibarengi dengan kematangan psikologis sering membuat keputusan gegabah yang kadang akan merugikan dirinya sendiri. Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel terdapat dibawah ini.

Tabel.1 Karakteristik Umur Responden

| No | Kategori umur (tahun) | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|-----------------------|--------|----------------|
| 1 | Muda (<= 25) | 1 | 4,76 |
| 2 | Dewasa (26 - <48) | 7 | 33,33 |
| 3 | Tua (>=48) | 13 | 61,90 |
| Total | | 21 | 100 |

Berdasarkan Data Pada tabel .1 dapat diketahui bahwa presentase umur responden paling besar berada pada kategori umur tua (>48 tahun) dengan tingkat presentase sebesar 61,90 %. Atau dengan kata lain masih didominasi oleh petani generasi pertama, yaitu petani yang menggarap lahan sejak awal izin Hkm. (Puspa & sari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banua, 2017) menerangkan bahwa fenomena ini terjadi karena petani hutan yang tergolong kategori tua masih merasa mampu menggarap lahan dan lahan garapan menjadi satu satunya tempat untuk mencari nafkah demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi (Puspa & sari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banua, 2017) menerangkan bahwa petani yang berada pada kategori lansia mulai mengalami penurunan kemampuan terutama dalam hal adopsi inovasi baru yang disebabkan oleh faktor menurunnya daya pikir sebagai imbas dari menurunnya tingkat kesehatan.

Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan dalam berfikir atau pola pikir seseorang, kemampuannya dalam memberikan daya penalaran. Sehingga makin lama seseorang mengenyam pendidikan akan lebih baik cara berfikirnya, sehingga memungkinkan seseorang bertindak lebih rasional dalam pengelolaan usaha taninya, baik itu berkaitan dengan adopsi teknologi dan lainnya. Gambarann umum terkait dengan Tingkat Pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel .2

Tabel .2 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responen

| No | Kategori Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|---------------------|--------|----------------|
| 1 | Rendah (0-6 tahun) | 14 | 66,67 |
| 2 | Sedang (9 -12tahun) | 6 | 28,57 |
| 3 | Tinggi (>12 tahun) | 1 | 4,76 |
| Total | | 21 | 100 |

Berdasarkan Tabel .2 dapat dilihat bahwa Sebagian besar responden petani Hkm memiliki Tingkat pendidikan yang berada dalam kategori rendah (0-6 tahun) dengan nilai persentase sebesar 66,67%. Hal ini terjadi karena dimasa lalu petani kurang mendapat dukukngan untuk melanjutkan Pendidikan dari orang tua dan lebih diarahkan untuk bekerja diladang, karena Pendidikan dianggap tidak akan dapat mengangkat derajat keluarga. Kristin et al., (2018) menyatakan bahwa rendahnya Tingkat

Pendidikan petani dapat menyebabkan rendahnya pengelolaanhasilhutan dan hasil pertanian yang dilakkan petani.

Luas Lahan Garapan

Luas lahan berhubungan dengan jumlah hamparan yang diusahakan oleh petani. Gambaran mengenai sebaran responden berdasarkan luas lahan yang diusahakan dapat dilihat pada Tabel .3

Tabel .3 Karakteristik Luas Lahan Garapan Responden

| No | Kriteria Luas Lahan (m2) | Jumlah | Persentase(%) |
|-------|--------------------------|--------|---------------|
| 1 | 0-1000 | 0 | 0,00 |
| 2 | >1000 - 2500 | 4 | 19,05 |
| 3 | <2500 - 5000 | 11 | 52,38 |
| 4 | > 5000 | 6 | 28,57 |
| Total | | 21 | 100 |

Berdasarkan Tabel .3 dapat dilihat bahwa Sebagian besar responden memiliki lahan Garapan yang tergolong dalam kriteria 4 (<2500 - 5000 m2) dengan persentase sebesar 52,3%. Luas lahan Garapan sendiri berkaitan dengan jumlah produksihasilhutan yang daatdikeluarkan oleh petani dan beranding lurus dengan Tingkat pendapatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Andrias et al., 2017) dan (Puspa & sari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banua, 2017) yang menyatakan bahwa luas lahan memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan petani.

Aspek Sosial

Aspek Sosial, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat pemegang ijin/hak kelola menuju pada kesadaran kelestarian fungsi hutan serta pemanfaatan hutan yang berkontribusi kepada pembangunan (Robert & Brown, 2004).

Kriteria Peningkatan Kesejahteraan Kelompok/Masyarakat/Desa

Kriteria pertama dalam evaluasi Aspek sosial pada hutan kemasyarakatan dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan kelompok/ Masyarakat/ Desa setelah adanya izin pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kriteria ini kemudian ditinjau dari 2 indikator yaitu: (1) apakah terjadi Peningkatan pendapatan anggota kelompok/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan dan (2) apakah terjadi Peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja di dalamnya, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel .4 Peningkatan Kesejahteraan Kelompok/Masyarakat/Desa

| No | Indikator | Interval Skor | Hasil Penelitian |
|-------------|---|---------------|------------------|
| 1 | Peningkatan pendapatan anggota kelompok/lembaga yang terlibat dalam | 10 - 30 | 23 |
| 2 | pengelolaan/pemanfaat hutan Peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangn kerja | 9 - 27 | 21 |
| Total Nilai | | 19 - 57 | 44 |

Berdasarkan Tabel .4 menunjukkan bahwa kriteria peningkatan kesejahteraan Kelompok/Masyarakat/Desa dalam pengelolaan hutan berada dalam kriteria baik dengan skor 44. Hal ini disebabkan karena pada indikator pertama terkait dengan peningkatan pendapatan anggota petani HKM sebgaaian besar petani (52,38%) menyatakan bahwa setelah adanya Hutan Kemasyaraktan pendapatan mereka meningkat. Peningkatan pendapatan ini salah satunya disebabkan karena pengelolaan hutan yang berbasis pada skema agroforestry dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Skema ini memungkinkan petani memiliki pendapatan dari setiap komoditi yang ditaman khususnya komoditi pisang yang dapat dipanen sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari petani, Adapun tanaman lain seperti durian, alpukat, Nangka, jeruk, dan kulur serta beberapa jenis empon empon seperti jahe, kunyit.

Adapun pada indikator yang menyatakan apakah ada peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja setelah adanya pemanfaatan hutan melalui skema hutan kemasyarakatan menunjukkan skor rata rata 21. hal ini disebabkan karena sebgaaian besar petani (47,62%) menyatakan adanya peningkatan tenaga kerja dan lapangan kerja. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dengan adanya hutan kemasyarakatan masyarakat desa Senggigi mendapatkan distribusi lahan secara merata pada Kawasan hutan kemasyarakatan. Selain itu pada beberapa waktu peningkatan tanga kerja terjadi Ketika ada program atau proyek rehabilitasi pada Kawasan hutan kemasyarakatan dengan memrioritaskan Masyarakat lokal untuk pengerjaannya.

Kriteria Penguatan Kelembagaan

Hasil penilaian Kriteria Penguatan kelembagaan HKM Merte Sari Desa Senggigi dapat dilihat pada tabel .5

Tabel .5 Penguatan Kelembagaan

| No | Indikator | Interval Skor | Hasil Penelitian |
|-------------|--|---------------|------------------|
| 1. | Status badan hukum lembaga pemegang ijin/hak kelola. | 5 - 15 | 5 |
| 2. | Pemegang ijin/ hak kekola hutan memiliki aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati Bersama | 10 - 30 | 30 |
| 3. | Pertemuan rutin pengurus dan kegiatan lembaga. | 8 - 24 | 17 |
| 4. | Tingkat partisipasi pengurus dan anggota pemegang ijin/hak kelola dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dan implementasi program kerja | 8 - 24 | 22 |
| 5. | Adanya kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya, dll) baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. | 8 - 24 | 16 |
| 6. | Keberadaan asset (modal, peralatan, tempat usaha, tanaman hutan, kendaraan, dll) lembaga pemegang izin/hak Kelola | 8 - 24 | 18 |
| 7. | Adanya iuran/tabungan pemegang ijin/hak kelola hutan | 6 - 18 | 15 |
| 8. | Ketersediaan daftar anggota dan struktur umur anggota lembaga pemegang ijin/hak | 8 - 24 | 24 |
| Total Nilai | | 61 - 183 | 123 |

Pada kriteria penguatan kelembagaan status badan hukum lembaga pemegang izin atau hak kelola ini masuk pada kategori kelompok Gapoktan yaitu kelompok tani hutan Merte Sari sehingga dapat memperoleh hasil penilaian rata- rata sebesar 5. Pada indikator selanjutnya yaitu pemegang izin hak kelola hutan memiliki aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, pada KTH Merte Sari memiliki AD/ART sebagai landasan aturan dalam pengelolaan hutan yang telah disepakati bersama. Kelompok tani hutan Merte Sari aktif dalam mengadakan pertemuan rutin antar pengurus dan anggota sekaligus menjalankan kegiatan yang dilaksanakan pihak Resort.

Pada indikator pertemuan rutin pengurus dan kegiatan lembaga didapatkan hasil penilaian rata-rata sebesar 17. Berdasarkan hasil wawancara, 18 responden menjawab bahwa pertemuan rutin dilakukan sekali

dalam 3 (tiga) bulan ini, sedangkan 3 responden lainnya menjawab bahwa pertemuan rutin dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Perbedaan jawaban ini dikarenakan banyak anggota tani yang menghadiri kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada indikator tingkat partisipasi pengurus dan anggota pemegang izin hak kelola dalam pembuatan kebijakan organisasi dan implementasi program kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 22. Hal ini dikarenakan 19 dari 21 responden menganggap bahwa pertemuan membahas tentang kebijakan yang berlaku dalam kelompok hanya melibatkan pengurus dan anggota.

Kelompok tani hutan Merte Sari bersama pihak Resort Malimbo jarang mengadakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan hasil hutan, Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. diperoleh hasil sebesar 16, pada indikator kelima yaitu adanya kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya dll) baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, terdapat 16 responden menjawab bahwa kegiatan serupa dilakukan setidaknya 1 kali setiap tahun. Adapun kegiatan pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan pembudidayaan cabai, empon-empon (kunyit, jahe dan lengkuas), dan porang dibawah tegakan pohon. Indikator keberadaan aset (modal, peralatan, tempat usaha, tanaman hutan, kendaraan dll) lembaga pemegang izin/hak kelola yang meningkat dari tahun ke tahun diperoleh hasil penilaian rata-rata sebesar 11. Responden mengaku aset yang dimiliki pribadi cenderung tetap sedangkan aset kelompok meningkat. Aset kelompok yang dimaksud adalah alat-alat pengolahan kopi, keripik pisang, dan alat-alat pembudidayaan lebah madu.

Pada indikator ketujuh diperoleh hasil penilaian sebesar 15. Terdapat pemungutan iuran kelompok secara aktif dilakukan, namun belum efektif. Berdasarkan pengakuan ketua kelompok, pemungutan iuran kelompok belum dilakukan 100%, banyaknya anggota yang belum mempunyai kesadaran dalam menunaikan tanggung jawabnya, sehingga banyak dari anggota lain yang mengikutinya. Penarikan iuran ini bersamaan dengan penarikan pembayaran PNBPN, yaitu sebesar Rp. 2000/are/tahun. Dari dana yang diperoleh, akan disetor sebagai pembayaran PNBPN dan sebagian dana disimpan sebagai iuran kelompok. Ketersediaan daftar anggota dan struktur umur anggota lembaga pemegang izin/hak kelola hutan berupa kartu anggota yang telah dibagikan kepada anggota kelompok, namun terdapat beberapa anggota yang belum dilakukan pengukuran batas areal garapannya, sehingga pemetaan lahan Garapan masih belum bisa diselesaikan.

Hasil penilaian kriteria Perubahan Perilaku Pengurus dan Anggota Pemegang Izin/Hak Kelola dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel .6 Perubahan Perilaku Pengurus dan Anggota Pemegang Izin/Hak Kelola

| No | Indikator | Interval Skor | Hasil Penelitian |
|-------------|---|---------------|------------------|
| 1. | Munculnya tokoh/kader baru | 7 - 21 | 14 |
| 2. | Perubahan perilaku pengurus dan anggota dari yang eksploitatif menjadi membangun hutan. | 7 - 21 | 16 |
| Total Nilai | | 14 - 42 | 30 |

Pada kriteria perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola terdapat 2 indikator. Indikator pertama yaitu munculnya tokoh kader baru Pada indikator ini memiliki hasil penilaian rata-rata sebesar 14. Terdapat 10 responden yang mengatakan bahwa pada kepengurusan ini memiliki pengurus baru, hal ini didukung dengan perubahan struktur organisasi kelompok tani hutan Merte Sari pada jabatan sekretaris dan bendahara. Menurut keterangan H. Amid selaku ketua kelompok pergantian kepengurusan pada kedua jabatan yang dimaksud telah dilakukan berdasarkan Keputusan anggota kelompok sebagai akibat dari ketidakpercayaan dan ketidakpuasan anggota terhadap kinerja sekretaris dan bendahara. Skema hutan kemasyarakatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya kepengurusan dalam kelompok memudahkan penyampaian informasi terkait pengelolaan hutan secara lestari. Pengurus sebagai jembatan informasi dari pihak resort kepada anggota tani hutan. Keberadaan pengurus dapat membantu peningkatan pemahaman anggota tani dalam mengelola lahan hutan secara lestari. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil penilaian rata-rata perubahan perilaku pengurus dan anggota dari yang eksploitatif menjadi membangun hutan sebesar 16. Hal ini menyatakan bahwa keaktifan pengurus dalam memberikan pemahaman kepada anggota tani dalam pemanfaatan, hutan secara lestari telah mencapai 80-100% dengan tidak ditemukan lagi kasus penebangan pohon yang dilakukan oleh pengurus dan anggota kelompok tani hutan.

Kriteria Resolusi Konflik

Hasil penilain Kriteria Resolusi Konflik dapat dilihat pada tabel .7

Tabel .7 Resolusi Konflik

| No | Indikator | Interval Skor | Hasil Penelitian |
|-------------|---|---------------|------------------|
| 1. | Keberadaan aturan internal dan prosedur penyelesaian konflik. | 8 - 24 | 21 |
| 2. | Pengalaman dalam proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa. | 7 - 21 | 18 |
| Total Nilai | | 15 - 45 | 39 |

Dalam suatu kelompok atau organisasi harus memiliki peraturan internal yang telah disusun dari kesepakatan bersama anggota kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, anggota kelompok tani mengaku bahwa KTH Merte Sari belum mempunyai aturan internal dalam penyelesaian konflik yang pernah terjadi. Dalam pengakuan responden, konflik yang pernah terjadi yaitu terkait perbatasan lahan yang belum jelas antar penggarap. Namun, hasil wawancara pada ketua KTH Merte Sari mengaku bahwa terdapat aturan tidak tertulis yang mengatur terkait penanganan konflik yang menghasilkan kesepakatan penyelesaian konflik melalui musyawarah kelompok. Sosialisasi terkait hasil kesepakatan dalam musyawarah pada anggota kelompok yang minim mengakibatkan anggota tidak mengetahui adanya kesepakatan yang mengatur penanganan konflik. Dari 21 responden yang diwawancarai, terdapat 11 responden yang mengaku mempunyai pengalaman dalam penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Sensitivitas Gender

Hasil penilaian Kriteria Sensitivitas Gender dapat dilihat pada table .8

Tabel .8 Sensitivitas Gender

| No | Indikator | Interval Skor | Hasil Penelian |
|----|--|---------------|----------------|
| 1 | Keterwakilan perempuan dalam pengurus lembaga pemegang ijin/hak kelola hutan | 8 - 24 | 15 |
| 2 | Tingkat partisipasi pengurus dan anggota perempuan | 8 - 24 | 19 |

| dalam kegiatan lembaga dan | | |
|----------------------------|---------|----|
| Total Nilai | 16 - 48 | 34 |

Pemegang izin kelola lahan garapan HKM Merte Sari tidak hanya laki- laki, namun terdapat perempuan sebagai pemegang izin kelola Dalam KTH Merte Sari, terdapat beberapa sub kelompok yang memiliki anggota perempuan Adanya perempuan sebagai pemegang izin kelola menjadikan keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi atau perkumpulan. Adanya keterlibatan perempuan dalam upaya pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan kawasan (Pratama & Rijanta, 2021). Terdapat 2 (dua) responden perempuan dalam penelitian ini yang merupakan responden yang direkomendasikan oleh ketua sub kelompok untuk diwawancarai karena berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok tani hutan. Pada indikator tingkat partisipasi pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan lembaga pengelolaan/pemanfaatan hutan diperoleh hasil penilaian rata-rata sebesar 19. Partisipasi anggota perempuan dalam kelompok tani sebatas mengikuti pertemuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok tani maupun pihak resort. Dalam pengambilan keputusan kelompok, anggota perempuan tidak dilibatkan.

Kriteria Kontribusi Pengelolaan Hutan terhadap Pihak Terkait

Hasil penilaian Kriteria Kontribusi Pengelolaan Hutan terhadap Pihak Terkait dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel .9 Pengelolaan Hutan terhadap Pihak Terkait

| No | Indikator | Intrval Skor | Hasil Penelitian |
|-------------|---|--------------|------------------|
| 1 | Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan | 5 - 15 | 7 |
| 2 | Adanya relationship antara pengelola hutan dan pihak terkait lainnya | 5 - 15 | 9 |
| Total Nilai | | 10 -30 | 16 |

Dalam kegiatan kelompok tani hutan Merte Sari terdapat pemungutan dana kelompok yang diperoleh dari iuran anggota KTH. Dalam juran kelompok ini terdapat pembagian dana yaitu terkait pembayaran PNBPN anggota kelompok tani hutan dan dana simpanan kelompok tani sebagai biaya dalam menjalankan kegiatan dalam upaya pengembangan kelompok. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua KTH Merte Sari, dana iuran kelompok tidak ada yang diperuntukkan untuk desa. Terdapat miskomunikasi antara pihak desa dan pihak KTH Merte Sari. Pihak desa menganggap dana pembayaran PNBPN kelompok tani dibayarkan untuk desa, sedangkan berdasarkan penyuluhan dari resort, dana PNBPN kelompok diserahkan kepada pihak Resort Monggal. Sedangkan indikator keterkaitan antara pengelola hutan dan pihak terkait lainnya diperoleh hasil penilaian rata-rata sebesar 9. Adanya laporan tahunan dari pengelolaan HKM Merte Sari berdasarkan rencana kerja tahunan, pembayaran PNBPN oleh kelompok tani menyebabkan adanya keterkaitan antara pihak pengelola hutan dengan pihak pemegang izin kelola. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan serta pelatihan yang diberikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola hutan menjadikan adanya hubungan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan ini.

Analisis Kinerja Pengelolaan HKM Merta Sari Aspek Sosial

Hasil analisis data Evaluasi Kinerja Hutan Kemasyarakatan Merte Sari Desa Senggigi pada aspek sosial yang terdiri dari 6 kriteria pada dilihat pada tabel .10 dibawah ini.

Tabel .10 Analisis Kinerja Aspek Sosial Pengelolaan Hkm Merta Sari

| | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|
| 6 | Kriteria Kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait | 10 | 30 | 16 |
| Jumlah | | 135 | 405 | 286 |

Berdasarkan Tabel .10 dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan HKM Merta Sari dari segi aspek sosial menunjukkan angka 286 atau dengan kata lain termasuk dalam kategori baik karena berada pada interval nilai >271 -339. Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi dari 6 kriteria penilaian aspek sosial yang terdiri dari (1). Kriteria peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat yang termasuk, (2). Kriteria penguatan kelembagaan, (3). Kriteria perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola, (4) Kriteria Resolusi konflik, (5). Sensitivitas Gender, dan (6) Kriteria Kontribusi Pengelolaan Hutan terhadap pihak terkait. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa dari segi aspek sosial Hkm Merta Sari perlu untuk terus berbenah lagi dalam mengelola kawasan HKM, sehingga kedepannya HKM memiliki kontribusi dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjaga fungsi lingkungan hidup.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Keberlanjutan kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah keadaan faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu penting untuk melihat faktor pendukung dan penghambat kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Merte Sari yang berada di wilayah senggigi yang dapat berguna dalam membangun kawasan Hutan Kemasyarakatan Merte Sari yang lebih baik kedepannya. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Kawasan Hutan Kemasyarakatan Merte Sari:

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik mengenai kinerja pelaksanaan HKM Merte Sari. Evaluasi menunjukkan nilai 286, yang tergolong baik, berdasarkan kriteria sosial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku, resolusi konflik, sensitivitas gender, dan kontribusi pengelolaan hutan. Faktor pendukung pengelolaan mencakup perencanaan yang baik dengan dokumen RKT dan RKT yang tersedia serta partisipasi anggota yang tinggi, serta pelatihan kelembagaan dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya data biofisik dan potensi sumber daya, kurangnya koordinasi antara Resort Malimbo dan kelembagaan HKM, serta

| Kriteria | Interval Nilai | | Skor Hasil Penelitian |
|---|----------------|-----------|-----------------------|
| | Terendah | Tertinggi | |
| 1 Kriteria Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa | 19 | 57 | 44 |
| 2 Kriteria Penguatan kelembagaan | 61 | 183 | 123 |
| 3 Kriteria Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola | 14 | 42 | 30 |
| 4 Kriteria Resolusi Konflik | 15 | 45 | 39 |
| 5 Sensitivitas Gender | 16 | 48 | 34 |

minimnya kualitas pendidikan SDM pengurus dan anggota.

Daftar Pustaka

- Andrias, A. A., Darusman, Y., & Ramdan, M. (2017). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Produksi dan Pendapatan Usaha Petani Padi Sawah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Agroinfo Galuh)*, 4(1), 521-529. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jimag.v4i1.1591>
- Asgar, L. P. W., & Bonita, M. K. (2019). Studi Pendapatan Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 2(2), 126-129.
- Cantika, L. (2021). *Analisa Pengaturan Comons Sebagai Strategi Penghidupan Masyarakat Pengelolaan HKm Sipatuo II di Masa Pandemi COVID-19*. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10300/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10300/2/M011171309_skripsi Bab 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10300/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10300/2/M011171309_skripsi%20Bab%201-2.pdf)
- Dan, M., Pada, K., Budidaya, D., Passcapanen, D., Pasar, F., Malayu, S. P., Dan, K., & Kerja, K. (2014). *Daftar pustaka*.
- Dianti, P. R. (2017). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Aspek Tata Kelola Kelembagaan dan tata Kelola Usaha di HKm Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Program Studi Kehutanan Universitas Mataram*, 5(1), 1-8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Fauzi, A. (2020). Evaluasi Pascapelatihan pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2019. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 289-296. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.3.289-296>
- Fauzi, M., & Nahlunnisa, H. (2021). Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas Journal of Forestry and Plant Science*, 4(1), 20-25.
- Gunawan, J., & Supriyadi. (2023). Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No . 9 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9(2), 1382-1391. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5101/http>
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 127-138.
- Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 9 (2021).
- Puspa, & sari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banua, I. S. (2017). Aspek social ekonomi pada sistem Agroforestry di areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Sylva Lestari*, 5(3), 95-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/js13595-103>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *No Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.9/PSKL/KUM.1/10/2019. 1, 1-14*.
- Rozikin, K. (2022). Pemanfaatan Waktu Luang Petani Agroforestry di Kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mataram Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara. *Fakultas Pertanian, Universitas Mataram*, 8.5.2017, 2003-2005.
- Supandi, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa Di Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2, 35-42.
- Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2022). *Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. VII(1), 2510-2519*.
- Vada, C., Markum, & Setiawan, B. (2019). *Kinerja Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Giri Madia Resort Jangkok Kesatuan Penggelolaan hutan Rinjani Barat*.